

**PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA
KERJA INDONESIA OLEH DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI DAN PERUSAHAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
INDONESIA SWASTA DI KABUPATEN KULONPROGO TAHUN 2016**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

**SITI ANISA
12340080**

PEMBIMBING:

NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Pada Undang-Undang No 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menjelaskan bahwa Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia adalah segala upaya melindungi kepentingan tenaga kerja dalam mewujudkan terjadinya pemenuhan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama maupun sesudah bekerja. Terdapat dua (2) Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk masa Pra Penempatan, Penempatan dan Kepulangan. Pada tahun 2016 di Yogyakarta khususnya di Kabupaten Kulonprogo ada 217 Tenaga Kerja Indonesia yang pergi keluar negeri untuk bekerja sebagai TKI. Kabupaten Kulonprogo menempati peringkat paling tinggi sebagai peminat warga untuk pergi keluar negeri untuk menjadi TKI. Hal ini menarik Penyusun untuk meneliti tentang bagaimana pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta PPTKIS Kabupaten Kulonprogo dan apakah sesuai dengan Undang-Undang No 39 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penempatan oleh Pemerintah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan *yuridis empiris* sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik, dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode wawancara, daftar pustaka dan dokumentasi. Penelitian ini berlokasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta dua PPTKIS PT Persada Duta Utama dan PT Dharmakarya Raharja di Kabupaten Kulonprogo.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerja sama dengan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta PPTKIS bertanggung jawab atas masa Pra Penempatan, Penempatan dan juga masa kepulangan. Di Kabupaten Kulonprogo ada dua PPTKIS yang resmi yaitu PT Persada Duta Utama dan PT Dharmakarya Raharja. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melayani para Pekerja Migran untuk mendapatkan informasi yang baik dan benar untuk bekerja di Luar Negeri. Permasalahan yang timbul yang terjadi pada para Tenaga Kerja Indonesia karena kurangnya informasi dan pengetahuan yang mendasar mengakibatkan para Tenaga Kerja Indonesia mendapatkan masalah diantaranya pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Penyikapi hal tersebut PT yang mengantar para TKI untuk lebih mengarahkan lagi akan bekerja seperti apa dan bagaimana memberikan penjelasan yang lebih detail lagi kepada para CTKI.

kata kunci : Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi, PPTKIS, Undang-undang No 39 Tahun 2004 dan Peraturan pemerintah No 4 Tahun 2013



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp(0274) 512840 Yogyakarta

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Anisa
Nim :12340080
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ **Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Oleh Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Perusahaan penempatan Tenaga Kerja Indonesia swasta Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016**” merupakan hasil penelitian saya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Mei 2018

Penulis


Siti Anisa

12340080



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp(0274) 512840 Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di tempat

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Siti Anisa
Nim : 12340080
Judul Skripsi :Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.sebagai salah satu syarat untuk meperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum


Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

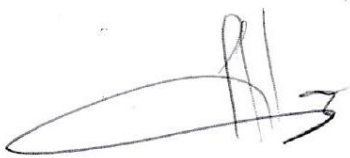
Wassalamu 'alaikum wr, wb.

Yogyakarta, 28 Mei 2018

Mengetahui
Ketua Prodi Ilmu Hukum

Pembimbing


Dr. Lindra Darnela S.Ag. M.Hum
19790105 200501 2 003


Nur'ainun Mangunsong, S.H. M.hum
19751010 200501 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-2120 /Un.02/DS/PP.00.9/08/2018

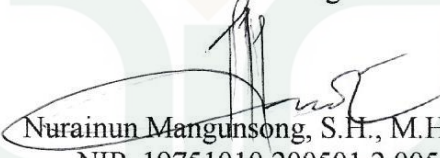
Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA OLEH DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI DAN PERUSAHAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
INDONESIA SWASTA KABUPATEN KULONPROGO TAHUN 2016

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

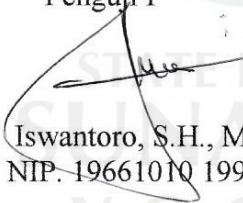
Nama : Siti Anisa
Nomor Induk Mahasiswa : 12340080
Telah diujikan pada : jum'at, 8 Juni 2018
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

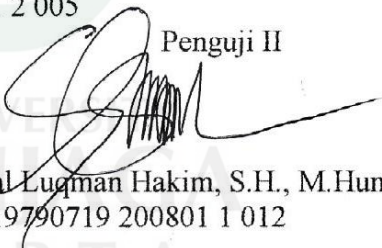
**TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang**


Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji I

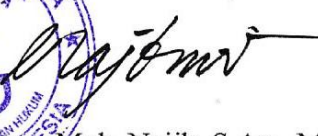

Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji II


Faisal Lugman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Yogyakarta, 23 Agustus 2018
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

HALAMAN MOTTO

**Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya.**

(Al-Baqarah: 286)

**“Kebahagiaan kita sendiri yang ciptakan, menebar kebaikan dan
kebahagiaan salah satu wujud meringankan beban, diri sendiri
maupun orang lain dan berfikir positif adalah cara yang ampuh untuk
menyembuhkan luka”**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengharap Ridha Allah SWT, karya ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku, Mama dan Mimi tersayang, yang selama ini dengan penuh kasih sayang dan do'anya selalu memberikan saya yang terbaik dan menjadikan saya pribadi yang baik, juga cinta kasih yang tak ternilai. Yang memotivasi saya sehingga saya selalu punya kekuatan untuk terus berjuang, serta adik-adikku Ahmad Musta'in, M. Rizki Ari Sandi, Syaifudin Zuhri, NAzwa Bliqis, yang selalu saya sayangi semoga kelak kalian akan menjadi orang besar dan terimakasih atas semua dukungan selama ini.
2. Untuk keluarga besarku, yang ada di Sumatera Selatan maupun yang di Cirebon terimakasih banyak karena sudah memberikan saya dukungan serta kasih sayangnya untuk saya, untuk uyutku semoga uyut panjang umur dan selalu menmotivasi saya untuk selalu baik kepada orang lain.
3. Teman-teman seperjuangan, Ilmu Hukum angkatan 2012.
4. Teman-teman KKN angkatan 93 pedukuhan Putat, pak Fauzi, Pilo, Sulaiman, Mu'az, Ce Dian, Kak Rosa, Ce ida, Ce Poo. terimakasih sudah memberikan pelajaran hidup selama kurang lebih dua bulan, dan memberikan pengalaman yang berharga juga adik-adik dukuh Putat yang senantiasa memberikan kehangatan kepada saya selama ini.
5. Untuk Fajar Nurvia terimakasih selama ini sudah memberikan saya dukungan serta motivasi untuk mengerjakan skripsi ini.

6. Sahabat-sahabatku tersayang, yang selalu memberikan saya kekuatan dan dukungan, serta memberikan saya solusi atas apa yang saya rasakan, untuk Desi Trisna terimakasih sudah menjadi adik juga kakak yang baik, juga teman-teman Sumo Squid yang telah menerima saya dengan baik, untuk Mbak Husnul dan Mbak Nunung terimakasih sudah selalu mengajak saya untuk tetap bertahan melanjutkan skripsi saya sampai pada kelulusan ini, dan masih banyak lagi saya ucapkan banyak terimakasih karena sudah banyak mendukung saya, memberikan dorongan serta motivasi.
7. Juga terimakasih untuk Minarsih, Dina Oktaviani, Ayu Mei Triana, Siti Maryam juga Juraida yang sudah menjadi sahabat yang baik.
8. Untuk Teman-teman seperjuangan IH, Nurfaizah Pratiwi, Esa Nuraisyah, Moh Singgih, M Fredico yang sangat luar biasa memberikan saya banyak sekali dukungan untuk selalu melanjutkan dukungan untuk mengerjakan skripsi ini
9. Terakhir terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Bliss Pool & Lounge yang telah menerima saya dengan sangat baik juga kepada bapak Ir. Roni Handoko yang sudah sangat baik menerima saya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين. اشهد ان لا
اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد و
على اله وصحبه اجمعين. اما بعد

Puji syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan nikmat Iman, Islam dan Ihsan, sehingga Penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta PPTKIS Kabupaten Kulonprogo Tahun 2017”, sholawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW karenanya Penyusun dapat merasakan Indahnya Islam.

Terselesaikannya penyusun skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan, dan motivasi dari banyak pihak yang senantiasa dengan sabar dan tulus serta ikhlas. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penyusun menyampaikan banyak terimakasih ter hadap:

1. Bapak Prof, Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Sektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr, H, Agus Moh NAjib. M,Ag. Selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Ibu Dr. Lindra Darnela, S. Ag., M.Hum Dan Bapak Faisal Lukman hakim, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Sekertaris Prigram Studi Ilmu Hukum.

4. Bapak Drs. Makrus M. Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah secara ikhlas meluangkan waktu untuk dapat memberikan arahan dan membagi ilmunya selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh staf pengajar serta dosen Program studi Ilmu hukum yang telah mengenalkan, membekali, membimbing atau memberikan ilmunya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan pendidikan di program Ilmu Hukum.
7. Ibu Tati selaku Tata usaha Program Ilmu Hukum yang dengan sabar dan telaten membantu penyusun dalam menyelesaikan administrasinya.
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta PPTKIS (PT Persada Duta Utama dan PT Dharmakarya Raharja) Kabupaten Kulonprogo. Terimakasih telah memberikan informasi dan pendampingan dalam menyusun skripsi ini.
9. Mama Dasuki dan Mimi Rukayah terimakasih banyak telah memberikan saya banyak sekali dukungan dan do'anya.
10. Untuk adik-adikku kalian adalah penghibur dalam kesuntukanaku, terimakasih sudah memberikan yang terbaik untuk kakakmu yang selalu bawel dan manja dan ingin selalu cepat pulang.
11. Teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2012 yang sudah lulus terimakasih sudah memotivasi saya untuk terus berjuang.
12. Teman-teman Pejuang Skripsi yang selalu memberikan dukungannya. Semoga kita selalu bisa bersilaturahmi setelah kelulusan ini.

13. Teman-teman KKN yang selalu memberikan keindahan dalam pertemuan. Kebaikan dan kekuatan untuk mengerjakan skripsi ini.
14. Teman-teman Bliss Pool dan Teman-teman Sumo Squid serta Teman-teman Sumo Sushi Bar terimakasih sudah memberikan banyak pelajaran yang berharga selama ini.
15. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyusun skripsi ini baik yang terlibat maupun yang tidak secara langsung.

Semoga ALLAH SWT senantiasa membalas segala kebaikan atas ketulusan yang telah diberikan. Penyusun sadar bahwa penyusunan skripsi ini banyak sekali kekurangan baik dari segi substansi maupun penulisan. Maka dari itu penyusun dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun untuk bisa menjadi lebih baik lagi.

Yogyakarta, 28 Mei 2018
Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Siti Anisa
12340080

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PESEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teoritik.....	10
G. Metode penelitian.....	19
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TENAGA KERJA DAN PERLINDUNGAN	
A. Ruang Lingkup Tenaga Kerja	
1. Pengertian Tenaga Kerja	24
2. Macam-macam Tenaga Kerja.....	25
3. Peraturan Tentang Tenaga Kerja	26
4. Hukum Ketenagakerjaan	27

5. Dasar Hukum Ketenagakerjaan	31
6. Sumber Hukum Ketenagakerjaan	32
B. Tenaga Kerja Indonesia	
1. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia	33
2. Tata cara proses penyaluran Tenaga Kerja dari Pra Penempatan Penempatan sampai Kepulangan	34
C. Hak dan kewajiban TKI	
1. Hak TKI dalam undang-undang No 39 Tahun 2004	42
2. Hak atas jaminan Hukum dan Keadilan	43
3. Hak dan Kewajiban TKi dalam Perjanjian Penempatan	45
4. Hak dan Kewajiban TKI dalam Perjanjian kerja	46
D. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	
1. Kewajiban Negara Memberikan Perlindungan Terhadap TKI....	48
2. Perlindungan Terhadap TKI melalui Asuransi	48
3. Perlindungan Buruh Migran terhadap Konverensi 1990.....	49
4. Perlindungan TKI berdasarkan Pernyataan Umum tentang Hak asasi Manusia.....	50
5. Perlindungan TKI berdasarkan Undang-undang No 39 Tahun 2004	51

BAB III DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SERTA PPTKIS

A. Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Kulonprogo	
1. Dasar Hukum	53
2. Tugas dan Fungsi Dinas tenaga Kerja dan transmigrasi	53
3. Struktur Organisasi	55
4. Sumber Daya Aparatur Kabupaten Kulonprogo	55
5. Visi dan misi	59
B. Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)	
1. Surat Ijin Pengesahan dan Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta	61

2. Tanggung jawab PPTKIS yang berkaitan dengan Perlindungan TKI	62
3. Sangsi terhadap PPTKIS yang melanggar aturan	63
4. Hak dan Kewajiban PPTKIS	63
5. Penyelesaian Masalah	64
6. Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta	66
BAB IV PELAKSANAAN PENEMPATAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA OLEH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DAN PPTKIS KABUPATEN KULONPROGO	
A. Ketidaksesuaian Perjanjian dan Pelaksanaan Penempatan di Luar Negeri.....	68
B. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sudah sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku	74
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	79
B. SARAN	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
CURICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pekerja migran merupakan sebutan bagi masyarakat yang bekerja di luar negara asalnya. Negara yang masuk dalam kategori dunia ketiga seperti Indonesia, memang belum memiliki kemampuan yang cukup kuat untuk memberikan jaminan kehidupan yang layak dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang mencukupi. Biasanya kita memberi sebutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau untuk yang lebih spesifik Tenaga Kerja Wanita (TKW) karena memang lapangan kerja bagi kaum perempuan lebih besar peluangnya untuk direkrut di sektor informal khususnya pekerja rumah tangga. Keberadaan mereka sering menjadi bahan pemberitaan media massa terkait perlakuan buruk yang mereka terima di luar negeri. Meski tidak semua buruh migran mengalami hal yang sama, namun tidak dipungkiri, sebagian besar masih berada dalam situasi rentan karena rendahnya perlindungan dan jaminan keamanan di negeri tujuan.¹

Pekerja Migran ialah pekerja yang bekerja luar dari tempat asalnya, baik dalam ataupun luar negara. Menurut Konvensi PBB mengenai Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarga Mereka, Pekerja Migran ialah orang yang membuat aktivitas berbayar di negara yang bukan negara asalnya.

¹ <http://bengkelulis-saddamcahyo.blogspot.co.id/2014/06/makalah-problematika-pekerja-migran.html>, akses 12 mei 2018.

Pada prinsipnya hukum kerja adalah “serangkaian peraturan yang mengatur segala kejadian yang berkaitan dengan bekerjanya seseorang pada orang lain dengan menerima upah.” Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (2)² menetapkan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Dari Pasal tersebut, jelas dikehendaki agar semua warga negara yang mau dan mampu bekerja supaya diberikan pekerjaan, sekaligus dengan pekerjaan tersebut agar mereka dapat hidup layak sebagai manusia yang mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh hukum.

Salah satu upaya yang selama ini dianggap efektif untuk mengatasi masalah penduduk adalah melaksanakan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri melalui kerja antar negara. Pengiriman tersebut setidaknya telah mendatangkan manfaat yang besar, yaitu:

1. Mempererat hubungan antar negara (negara pengirim dan negara penerima).
2. Mendorong terjadinya pengalaman Kerja dan ahli teknologi.
3. Meningkatkan pembayaran di dalam neraca pembayaran negara (devisa).

Selain membawa dampak positif seperti yang dikemukakan di atas, ternyata dalam praktek penyelenggaraannya timbul beberapa dampak negatif seperti adanya tindakan-tindakan di luar batas keprikemanusiaan yang menimpa para tenaga kerja. Terjadi tindakan-tindakan di luar batas

² Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

perkemanusiaan itu jelas merugikan tenaga kerja Indonesia sendiri secara individual dan dapat merusak citra bangsa Indonesia sehingga tidak mengherankan akan timbul “suara-suara” yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan program antarkerja antarnegara ini.

Sempitnya lapangan pekerjaan di Indonesia mendorong jumlah TKI yang mengadu nasib ke berbagai negara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Keinginan untuk memperbaiki taraf hidup dengan bekerja di luar negeri mengalahkan gambaran tentang kekerasan, eksploitasi, dan kebijakan deportasi terhadap TKI. Bahkan hal itu akan tetap dilakukan meskipun harus pergi dengan status tak berdokumen.

Sementara itu, selain berhak memperoleh pekerjaan, Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia lebih menegaskan lagi bahwa warga negara juga berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya. Oleh karena itu, warga negara tidak dapat dilarang untuk bekerja dimana saja, termasuk di luar negeri. Di samping faktor penarik yang ada di luar negeri berupa upah yang lebih tinggi, maka faktor yang paling berpengaruh adalah faktor pendorong yang ada di dalam negeri, yaitu belum terpenuhinya salah satu hak dasar warga negara yang paling penting yaitu: pekerjaan, seperti diamanatkan di dalam Pasal 27 D ayat (2) UUD 1945. Adanya tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri mendorong pemerintah untuk membuat aturan yang berguna untuk melindungi para Tenaga Kerja Indonesia. Diundangkannya Undang-Undang No 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar

Negeri diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi para Tenaga Kerja Indonesia yang berada di Luar Negeri. Selain itu adanya Permennakertrans No. 14/Men/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.07/Men/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia juga merupakan landasan hukum untuk melindungi TKI yang berada di luar negeri. Dalam rangka perbaikan tata kelola penempatan dan perlindungan TKI, telah dilaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi administratif berupa pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) bagi PPTKIS yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri serta peraturan-peraturan lainnya terkait penempatan dan perlindungan TKI.

Secara umum, pelanggaran yang banyak dilakukan PPTKIS yang dicabut izinnya itu adalah memiliki sarana dan prasarana penampungan TKI yang tidak layak, misalnya tempat tidur atau kamar mandi yang tidak memadai. Selain itu, pelanggaran yang sering dilakukan adalah pemalsuan sertifikat pelatihan TKI yang seharusnya sesuai peraturan yang ada, begitu juga pemalsuan umur calon TKI, Kemenaker terus melakukan pembenahan terhadap sistem penempatan dan perlindungan TKI dengan mengeluarkan berbagai regulasi, termasuk terbitnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja

(Permenaker) No.22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Permenaker tersebut memberikan aturan ketat terhadap PPTKIS. "Salah satu poin penting dalam aturan baru ini adalah ditetapkan blacklist selama lima Tahun terhadap penanggung jawab PPTKIS yang sudah dicabut SIUPnya karena melakukan pelanggaran berat.

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menjelaskan bahwa Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia adalah segala upaya melindungi kepentingan tenaga kerja dalam mewujudkan terjadinya pemenuhan hak-hak sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan, baik sebelum, selama maupun sesudah bekerja. Perlu adanya jaminan tentang keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas yang sebesar-besarnya.

Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tingginya minat masyarakat untuk menjadi TKI juga terjadi, khususnya di Kabupaten Kulonprogo. Pada Tahun 2016 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tercatat 217 orang ditempatkan bekerja di luar negeri. Keadaan ekonomi yang relatif rendah mendorong masyarakat di daerah tersebut memiliki minat yang tinggi untuk menjadi TKI di luar negeri³. Pendaftaran Calon Tenaga Kerja Indonesia dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Nakertrans) dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).

³ Sumber: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Maguwoharjo, akses 09 mei 2018

Sehubungan dengan hal tersebut, Nakertrans melakukan kerjasama dengan PPTKIS untuk melakukan pengiriman TKI ke Luar Negeri. Di Kulonprogo terdapat beberapa PPTKIS yang melakukan kerjasama dengan Nakertrans. Salah satu PPTKIS yang bekerjasama dengan Nakertrans Kulonprogo yaitu PT Persada Duta Utama. Dan PT Dharmakarya Raharja. PT Persada Duta Utama dan PT Dharmakarya Raharja merupakan suatu perusahaan yang menangani masalah calon TKI di Kabupaten Kulonprogo. PT Persada Duta Utama dan PT Dharmakarya Raharja bertanggung jawab atas masa pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan masa setelah penempatan calon TKI.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahan diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta PPTKIS Kabupaten Kulonprogo?
2. Apakah Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan PPTKIS sudah sesuai dengan Undang-Undang No 39 Tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2013?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan PPTKIS terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Kulonprogo.
2. Tata cara pelaksanaan proses penempatan TKI di luar negeri di Kabupaten Kulonprogo.
3. Mendeskripsikan upaya perlindungan TKI di Kabupaten Kulonprogo.

D. Kegunaan Penelitian :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah khasanah pengetahuan, dan memberikan kegunaan untuk pengembangan Ilmu Hukum yang merupakan salah satu rumpun dari Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya Hukum Ketenagakerjaan. Penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam penelitian berikutnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Bermanfaat untuk mengembangkan penalaran dan menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah Pendidikan

Kewarganegaraan dan Hukum dan sebagai bekal untuk menjadi guru yang profesional.

b. Bagi Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulonprogo

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau bahan pertimbangan bagi Dinsosnakertrans dalam rangka menetapkan kebijakan - kebijakan yang mengatur tentang perlindungan TKI khususnya di Kulonprogo.

c. Bagi PTKIS

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau bahan pertimbangan bagi PTKIS dalam rangka memberikan pelayanan bagi para calon TKI.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun literatur yang didalamnya membahas tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI oleh Dinas Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Kulonprogo. Skripsi yang ditulis oleh Lutfiati Rohimah yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja di Luar Negeri menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” yang membahas tentang hukum islam belum memberikan konsep yang utuh berupa ketentuan-ketentuan secara rinci mengenai bagaimana prosedur

penempatan dan perlindungan hak-hak TKI dilaksanakan, hukum islam hanya bersikap *fakultatif* (hukum yang mengatur atau melengkapi) dan pelaksanaannya berdasarkan perjanjian kerja.⁴ Skripsi yang ditulis oleh Wisnu Kawiryan yang berjudul “Perlindungan TKI di Luar Negeri oleh BP3KI Yogyakarta, Pada Masa Pra Penempatan” yang membahas tentang bentuk perlindungan yang dilaksanakan oleh BP3KI pada masa pra penempatan meliputi: sosialisasi PTKLN, pengurusan dan verifikasi dokumen tenaga kerja diluar negeri, memberikan pembekalan sebelum pemberangkatan berkoordinasi dengan PPTKIS juga mengalami pengaduan tentang masalah yang dihadapi TKI.⁵ Adapun skripsi yang ditulis oleh Mahendra Handoko yang berjudul “Ketentuan Pidana didalam Undang-Undang no 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri”⁶ dan skripsi yang ditulis oleh Rashit Imany pada Tahun 2009 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Terminate Tenaga Kerja Indonesia Wanita pada PT. Antar Bangsa Citra Dharmaindo Kabupaten Trenggalek”.⁷

⁴Lutfiah Rohimah, “Perlindungan Hukum Terhadap TKI di Luar Negeri Menurut Hukum Positif dan Hukum slam”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2012).

⁵Wisnu Karwiyana, “Perlindungan TKI di Luar Negeri Oleh BP3KI Yogyakarta pada Masa Pra Penempatan”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015).

⁶Mahendra Handoko, “Ketentuan Pidana didalam Undang-Undang No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2008).

⁷Rashif Imany. “Tinjauan Hukum Inslam Terhadap Terminate Tenaga Kerja Indonesia Wanita pada PT. Antar Bangsa Citra Dharmaindo Kabupaten Trenggalek,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2009).

F. Kerangka Teoretik

Adapun beberapa teori yang menjadi pijakan peneliti dalam melakukan penelitiannya ialah sebagai berikut:

1. Teori Negara Hukum

Pemikiran negara hukum dimulai sejak Plato dengan konsepnya bahwa “penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebutnya dengan istilah *nomoi*” Konsep negara hukum Eropa Kontinental *Rechtstaat* di pelopori oleh Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl. Menurut Stahl konsep ini ditandai oleh empat unsur pokok yaitu : (1) pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, (2) negara didasarkan pada teori trias politika, (3) pemerintah diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang, (4) ada Pengadilan Administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechmatige overheidsdaad*)⁸ Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun

⁸Titik Triwulan T, dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* Indonesia, (jakarta: kencana 2011), hlm, 267

2000 tentang Pengadilan HAM)⁹. Dengan HAM ini pemerintah bisa melindungi warganya baik dalm negeri maupun luar negeri. Karena HAM menjangkau secara luas, sudah banyak peran HAM dalam mengatasi berbagai masalah kemanusiaan di Indonesia. Mulai dari kasus pemulung sampai kasus TKI di bahas oleh Komnas HAM. Perlindungan terhadap TKI Presiden Republik Indonesia Menimbang. *Pertama*, bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya. *Kedua*, bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan. *Ketiga*, bahwa tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. *Keempat*, bahwa negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, dan anti perdagangan manusia. *Kelima*, bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan

⁹Tulisan tentang Pengertian Hak Asasi Manusia Menurut Para Ahli, 10 November 2010, akses 09 mei 2018.

hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional.¹⁰ Perlindungan terhadap tenaga kerja, sudah jelas bahwa para TKI menjadi tanggung jawab dan dibawah naungan Negara. Apabila terjadi satu dua hal maka Negara wajib mengambil tindakan yang tegas untuk membantu TKI tersebut menyelesaikan masalahnya, karena hal ini memang secara resmi termaktub langsung dalam UU oleh Presiden Republik Indonesia.

2. Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dinyatakan bahwa "Pemerintah bertugas mengatur, Membina, Melaksanakan, dan Mengawasi Penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri." Dan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 bahwa Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 mengatur tentang penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia atau ke negara tujuan yang

¹⁰ <http://www.gerakanantitrafficking.com/> , akses 09 mei 2018

mempunyai peraturan perUndang-Undangan yang melindungi tenaga kerja asing, oleh sebab itu setiap orang dilarang menempatkan calon TKI pada jabatan atau tempat kerja yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan serta peraturan perUndang-Undangan, baik di Indonesia maupun di negara tujuan atau di negara tujuan yang telah dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, maka semakin jelas dan nyata kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatur penempatan TKI. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 memberikan definisi yuridis "Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.¹¹ Dalam melakukan perlindungan terhadap TKI, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban:

- a. Menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri.
- b. Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI.

¹¹Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 139*, akses 09 mei 2018.

- c. Membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri.
- d. Melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan.
- e. Memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.

Perlindungan bagi TKI yang bekerja di luar negeri dimulai dan terintegrasi dalam setiap proses penempatan TKI, sejak proses rekrutmen, selama bekerja dan ketika pulang ke tanah air. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 bahwa setiap calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang undangan. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan

3. Teori Kewenangan

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga Negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu Negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk

mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga Negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban. Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (*inkonstitusional*), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi. Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah "*bevoegheid*" dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah "*bevoegheid*". Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah "*bevoegheid*" digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD). Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat). Dalam kaitan dengan konsep atribusi, delegasi, ataupun mandat, J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, mengatakan¹²

1. *With attribution, power is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is initial (originair), which is to say that is not derived from a previously existing power. The legislative body creates independent and previously non existent powers and assigns them to an authority.*
2. *Delegation is a transfer of an acquired attribution of power from one administrative authority to another, so that the*

¹² J.G. Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, (Nijmegen: Ars Aequilibrari, 1998), hlm. 16-17

delegate (the body that the acquired the power) can exercise power in its own name.

- 3. With mandate, there is not transfer, but the mandate giver (mandans) assigns power to the body (mandataris) to make decision or take action in its name.*

J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau Lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan Legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten. Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) Pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya. Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin

dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut. Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perUndang-Undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perUndang-Undangan.
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
4. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
5. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan

mempertahkannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar¹³.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif*, yaitu penelitian yang menggambarkan atau menjelaskan serta memberi data sedetail mungkin mengenai permasalahan yang diteliti.

a. Sumber Data

1. Data Primer

Keterangan yang secara langsung diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta PPTKIS Kulonprogo Yogyakarta.

2. Data Sekunder

Keterangan-keterangan yang diperoleh dari bahan-bahan perpustakaan, dalam hal ini mengacu pada literature, perUndang-Undang, serta data lain yang relevan dengan penelitian ini yang kemudian dibedakan menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari perUndang-Undang.

¹³ F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 219.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti jurnal, dan penelitian tentang Pelaksanaan Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta PPTKIS di Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Yuridis-Empiris*. Pendekatan ini berguna untuk mendekati masalah yang dikaji dengan menggunakan dasar perUndang-Undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang No 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Tenaga kerja Indonesia dan Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penempatan Tenaga kerja Indonesia oleh Pemerintah.

3. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan merupakan penelitian yang bersifat *Deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran atau sebuah permasalahan dengan melalui kegiatan analisi data

penelitian.¹⁴ *Deskriptif* berarti mendeskriptifkan atau menjelaskan peraturan-peraturan yang ada dan yang saat ini berlaku sebagai hukum positif.¹⁵ Sedangkan analisis berarti menjelaskan lebih mendalam daripada sekedar *deskriptif*,¹⁶

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu suatu secara memperoleh informasi langsung dan aktifitas yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan menggunakan pedoman wawancara sebagai pemandunya.
- b. Studi Pustaka, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan arsip-arsip yang ada yang sesuai dengan materi yang peneliti bahas.
- c. Dokumentasi, yaitu sesuatu yang di peroleh dengan cara mengambil gambar atau surat-surat yang berkaitan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan PPTKIS Kabupaten Kulonprogo

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode *diskriptif kualitatif* yang memaparkan secara jelas dengan kalimat-kalimat untuk menjawab perihal apa saja yang dapat

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum normative, Suatu Tinjauan Singka*, (Jakarta: Rajawali, 1998), Cet. Ke-2, hlm. 14-15

¹⁵ Suratman, dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum, Dilengkapi Tata Cara Contoh Penulisan Karya Ilmian Bidang Hukum*, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2012), hlm. 229.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Huklum*, (Jakarta: UI Press, 1986), Cet.Ke-3, hlm. 7.

dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan PPTKIS Kulonprogo.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama berisi uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang Tinjauan umum tentang Tenaga Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum Kabupaten Kulonprogo dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Kulonprogo serta PPTKIS Kabupaten Kulonprogo, Fungsi, Tugas, visi dan misi, Kedudukan, tata struktur serta Mekanisme Pelaksanaan Perlindungan Dinsosnakertrans dan PPTKIS dikabupaten Kulonprogo

Bab keempat berisi tentang analisa tentang Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta PTKIS Kulonprogo apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang No 39 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2013.

Bab kelima, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran penelitian yang mungkin belum tercantum atau terlewatkan dalam penelitian ini



BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia oleh PPTKIS

Pelaksanaan Penempatan yang di lakukan oleh PPTKIS sudah cukup maksimal untuk para TKI yang ingin bekerja di Luar Negeri. Penempatan yang di sediakan oleh PPTKIS dapat di pertanggung jawabkan oleh PPTKIS tersebut. Di Kulonprogo sendiri terdapat dua PPTKIS yang resmi dan pelayanan yang diberikan oleh kedua PPTKIS tersebut sudah maksimal dan menjamin kehidupan para TKI di masa yang akan datang.

b. Ketidaksesuaian Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Oleh PPTKIS

Ketidaksesuaian yang penulis temukan adanya para TKI yang pulang ke Indonesia tidak di antar ataupun di jemput oleh PPTKIS, seharusnya PPTKIS bertanggung jawab atas kepulangan para TKI. Pada masa Pra Penempatan sampai Penempatan, PPTKIS melaksanakan Tugas dan Hak yang telah di tentukan oleh Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 20013 namun pada masa kepulangan TKI berinisiatif untuk pulang ke Tanah air dengan Kepulangan Mandiri. Sebagai Warga Negara Indonesia, kita tentunya sangat menginginkan hidup yang layak dan aman serta

damai, oleh karena itu banyak sekali para Warga Negara Indonesia memilih untuk bekerja di Luar Negeri karena terlalu sempitnya lapangan Pekerjaan yang ada di dalam negerinya sendiri juga banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhinya sehari-hari, tak heran jika para warga negara berbondong-bondong untuk pergi ke luar negeri. Namun ada baiknya kita sebagai warga negara yang baik harus menghormati nama negara kita sendiri yaitu Indonesia dengan berbuat yang baik di negara orang lain. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak bisa melarang siapa saja yang telah memenuhi syarat untuk pergi keluar negeri, PPTKIS yang bersangkutan tidak bisa melarang siapapun untuk pergi bekerja diluar negeri, yang dapat dilakukan oleh Pemerintah adalah bagaimana melaksanakan Peraturan yang baik untuk kemajuan para Tenaga kerja Indonesia. Perlindungan yang diberikan Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi serta PPTKIS sudah sangat baik bagi Para Tenaga Kerja Indonesia, maka para Tenaga Kerja Indonesia harus bisa memanfaatkan apa yang sudah diberikan Pemerintah untuk Kepentingan para Tenaga Kerja Indonesia.

2. Saran

Untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar selalu melakukan yang terbaik untuk perlindungan Tenaga Kerja Indonesia agar para TKI tidak mendapatkan kesalahan informasi atau menyesal dikemudian hari karena tidak mengikuti informasi. untuk PT Persada Duta Utama diharapkan untuk terus melakukan tugas-tugas yang baik agar para Tenaga Kerja Indonesia

tidak kecewa dengan PT Persada Duta Utama dan memilih cara Ilegal. Untuk PT Dharmakarya Raharja agar dapat memastikan Tenaga Kerja Indonesia akan bekerja dimana dan dalam posisi seperti apa agar tidak terjadi kesalah pahaman yang berakibat fatal.

Dan untuk para TKI agar selalu melindungi diri dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan juga harus selalu bertanya jika tidak jelas juga harus mengikuti semua proses yang telah disediakan agar di kemudian hari tidak menyesal.



DAFTAR PUSTAKA

A. Dari PerUndang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.07/Men/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja.

Permennakertrans Nomor 14/Men/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

B. Dari Buku, Jurnal

Manulang, Sendjun H, *pokok pokok hukum ketenagakerjaan*, jakarta: Rineka Cipta, 1995.

Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Pemburuan di Indonesia*. di menerbitkan PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.1995.

J.G. Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, (Nijmegen: Ars Aequilibrari, 1998), h. 16-17.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, suatu *Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, Cet. Ke-2, 1998.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm, 10-11.

F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 219.

Soekamto, Soerjono, *pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press, 2007.

Mahendra Handoko, “Ketentuan Pidana didalam Undang-Undang no 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2008).

Rashif Imany. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Terminate Tenaga Kerja Indonesia Wanita pada PT. Antar Bangsa Citra Dharmaindo Kabupaten Trenggalek,” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2009).

Titik Triwulan T, dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (jakarta: kencana 2011), hlm, 267.

Lutfiah Rohimah, “Perlindungan Hukum Terhadap TKI di Luar Negeri Menurut Hukum Positif dan Hukum slam”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2012).

Ni’matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 82.

Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 106.

Wisnu Karwiyani, “Perlindungan TKI di Luar Negeri Oleh BP3KI Yogyakarta pada Masa Pra Penempatan”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015).

C. Lain-lain

<http://www.bnp2tki.go.id/read/9511/Jumlah-TKI-Asal-Jabar-Terbanyak-Dibandingkan-Daerah-Lain.html>

Sumber aplikasi *ktkln-bnp2tki* diperoleh dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Maguwoharjo Yogyakarta pada tanggal 20 november 2017

www.harianjogja.com/baca/2009/07/10/tki-informal-ke-malaysia-dihentikan

<http://sonny-tobelo.blogspot.co.id/2011/01/teori-kewenangan.html>

<http://bengkelulis-saddamcahyo.blogspot.co.id/2014/06/makalah-problematika-pekerja-migran.html>

https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_kerja#Berdasarkan_penduduknya

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Nasional_Penempatan_dan_Perlindungan_Tenaga_Kerja_Indonesia

<https://insertpoin.blogspot.co.id/2016/05/makalah-perlindungan-hukum-terhadap.html>

Pusat sumber daya buruh migran, rujukan informasi Tenaga Kerja Indonesia., dikutip pada tanggal 20 Desember 2017

<http://www.lpkkorindo.com/2012/07/apa-itu-pptkismari-mengenal-lebih-jauh.html>

Subbag Umum dan Kepegawaian Disnakertrans KP



Wawancara dengan Bapak Susilo, Bapak Amry dan Bapak Agus

Bapak Amry



bapak Agus



Bapak Susilo



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Permohonan Recome Paspor dan ID CTKI

PT. HAENA DUTA CEMERLANG
Jl. Duta Asri VI No. 15 Medan Setra - Bekasi
Telp. 021 - 87784191, 021 - 87784190 - 01262311 Fax. 021 - 87784190
e-mail haenacemerlang@yahoo.com

Nomor : 117 / PRPP-ID / HAENA-DIY/IV/2018
Lamp
Hal : Permohonan Rekomendasi Pembuatan Paspor Dan ID CTKI

Kepada Yth,
Yth. Kepala Dinas Sosial Nakertrans Kab. Kulon Progo
Di KULON PROGO

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan rekomendasi pembuatan paspor dan ID untuk Tenaga kerja Indonesia yang akan kami tempatkan pada perusahaan INSTRUMENT TECHNOLOGY (JOHOR) SDN BHD sebagai operator Production sebanyak 2 (dua) orang daftar nama calon tenaga kerja Indonesia sebagai berikut :

No.	NAMA	L/P	Tempat & Tgl Lahir	Ket	Pend.	Alamat
1	Rumiyati	p	Kulon progo, 08 Agustus 1987	Baru	SMP	Belik Rt/Rw. 12/06 Demangrejo Sentolo Kulon Progo Yogyakarta
2	Tatik Sutanti	p	Kulon Progo, 23 Mei 1991	Baru	SMK	Kalikepek RT/Rw. 34/15 Giripemi Wates Kulon Progo Yogyakarta

Demikian permohonan ini kami sampaikan , atas perhatian dan bantuanya serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Rumiyati : *Guna Komana? ya Hdi ayahay??*
Tatik : *---*

Yogyakarta, 27 April 2018
Hormat Kami,

560/1230 8-5-18

HAENA
Mardiyono
Direktur

Surat Ijin Pengerahan SIP

**BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
DEPUTI BIDANG PENEMPATAN**

Jalan MT. Haryono Kav. 52 Gedung A Jakarta Selatan - 12770, Telp.: (021) 7981205 Fax (021) 7981205
PO BOX 4451 JKTS, Website : www.bnptki.go.id

No. : B. 160/SIP-00/PEN-P2P/IV/2018 Jakarta, 04 April 2018
Maksud :
Perihal : **SURAT IZIN Pengerahan (SIP)**

Kepada Yth.
Direktur Utama
PT. HAENA DUTA CEMERLANG
JL. DUKUH VI NO.45 RT.008/002 KEL.DUKUH KEC. KRAMAT JATI, JAKTIM

Menunjuk surat saudara nomor : 005/SIP/HDC-JOG/IV/2018, tanggal 02 April 2018 tentang Permohonan Penerbitan Surat Izin Pengerahan (SIP) dan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor : 22 Tahun 2014 dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor : 378 Tahun 2014, maka :

Nama Perusahaan : PT. HAENA DUTA CEMERLANG
SIPPTKI : KEP.348/MEN/X/2009
Nama Penanggung Jawab : DEDE BAHRUDIN
Jabatan : Direktur Utama
Mitra Usaha/Agency : INSTRUMENT TECHNOLOGY (JOHOR) SDN BHD
No. dan Tgl. Legalisasi JO : A-6083/KONS-JB/II/2018 tanggal 29 Januari 2018
Negara Tujuan : MALAYSIA
Jumlah Permintaan : 100 orang

Diberikan izin untuk melakukan perekrutan di Provinsi DI YOGYAKARTA, sebagai berikut :

No	Jabatan	Jenis Kelamin			Jumlah
		L	P	L&P	
1	Production Operator	0	16	0	16

Masa Berlaku : 04-04-2018 s.d. 04-10-2018

Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan dimaksud, agar Saudara :

- Melakukan pengurusan ke Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Provinsi DI YOGYAKARTA untuk mendapatkan alokasi Calon TKI dan Surat Pengantar Rekrut ke Kabupaten/Kota
- Memperpanjang masa berlaku SIP apabila kebutuhan Calon TKI belum terpenuhi dan jangka waktu Job Order/Demand Letter/Visa Wakalah masih berlaku

Permohonan Penerbit SPR

Nomor : 028/SPR/HDC-JOG/IV/2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penerbitan SPR

09 April 2018

Kepada Yth
Kepala Dinas DISNAKER PROVINSI YOGYAKARTA
Di tempat

Berdasarkan pengesahan Surat Ijin Pengerahan (SIP) Nomor : B. 160/SIP-00/PEN-P2P/IV/2018 tanggal 04 April 2018 bersama ini kami mengajukan permohonan untuk diterbitkan Surat Pengantar Rekrut (SPR) untuk wilayah rekrut sebagaimana rincian sebagai berikut :

NO	Jabatan	Jenis Kelamin			Jumlah
		L	P	L&P	
1	Production Operator	0	16	0	16

Dapat direkrut di Kabupaten/ Kota tersebut di bawah ini:

1	BANTUL	5	SLEMAN
2	GUNUNG KIDUL	6	YOGYAKARTA
3	KULONPROGO		
4	SLEMAN		

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

DIREKTUR UTAMA
PT.HAENA DUTA CEMERLANG

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

No	Tgl	Tempat	Topik	Isi	Tempat	Topik	Isi	Tempat	Topik	Isi	Tempat	Topik	Isi
16	23-Feb-18	PT Duta Pustaka Purabaya	Kelembagaan	Kelembagaan PT Duta Pustaka Surabaya	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan PT Duta Pustaka Surabaya	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan PT Duta Pustaka Surabaya	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan PT Duta Pustaka Surabaya
17	24-Feb-18	ASRI Singaperbangsa	Kelembagaan	Kelembagaan ASRI Singaperbangsa	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan ASRI Singaperbangsa	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan ASRI Singaperbangsa	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan ASRI Singaperbangsa
18	26-Feb-18	PT Easidhi Sana Surabaya	Kelembagaan	Kelembagaan PT Easidhi Sana Surabaya	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan PT Easidhi Sana Surabaya	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan PT Easidhi Sana Surabaya	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan PT Easidhi Sana Surabaya
19	26-Feb-18	PT Sukemaha Madiun Ageng	Kelembagaan	Kelembagaan PT Sukemaha Madiun Ageng	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan PT Sukemaha Madiun Ageng	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan PT Sukemaha Madiun Ageng	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan PT Sukemaha Madiun Ageng
20	26-Feb-18	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan
21	08-Maret-2018	EDM Pustaka Lumajang	Kelembagaan	Kelembagaan EDM Pustaka Lumajang	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan EDM Pustaka Lumajang	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan EDM Pustaka Lumajang	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan EDM Pustaka Lumajang
22	13-Maret-2018	LOLEDA R Mongings	Kelembagaan	Kelembagaan LOLEDA R Mongings	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan LOLEDA R Mongings	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan LOLEDA R Mongings	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan LOLEDA R Mongings
23	13-Maret-2018	1688 Pustaka Lumajang	Kelembagaan	Kelembagaan 1688 Pustaka Lumajang	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan 1688 Pustaka Lumajang	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan 1688 Pustaka Lumajang	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan 1688 Pustaka Lumajang

CURRICULUM VITAE



Data Pribadi

Nama : Siti Anisa
Tempat, tanggal lahir : OKU Timur, 20 Juli 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat asal : Batumarta VII Blok B Rt/Rw 001/002 Desa Wanabakti
Kec. Madang Suku III Kab. Ogan Komering Ulu Timur
Sumatera Selatan
Alamat di Yogyakarta: Gang Ori 1 No 17G Papringan, Depok, Sleman, Yogyakarta, DIY
Email : annisa.sungkowo@gmail.com

LatarBelakangPendidikan

Formal

2000-2006 : SDN 1 Batumarta VII Blok A
2006-2009 : MTsN Babakan Ciwaringin Cirebon, Jawa Barat
2009-2012 : Man Model Babakan Ciwaringin Cirebon, Jawa Barat

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya

Siti Anisa